

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Alfisyahrin, Muhammad, 2017, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Anshory, Imam, 2014, *Konsep Pengawasan Hakim*, Setara Press, Malang.
- Arsana, I Putu Jati, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bohari, H., 1990, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hayat, 2018, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Larasati, Sri, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Simatupang, Dian Pudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Marbun, S.F., dan MD, Moh. Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

MD, Moh. Mahfud, 2000, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih, Meylani, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Putra, Teddy Minahasa, 2019, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, Grasindo, Jakarta.

Rahmat, Abdul, 2020, *Manajemen Pemerintahan*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soebhan, Syafuan Rozi, 2000, *Model Reformasi Birokrasi di Indonesia*, LIPI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjokrowinoto, Moljarto, 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

Yusriadi, 2018, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Hapsari, Julia, Hartuti Purnaweni, dan Priyadi, Budi Puspo, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

Lahiang, Mersel Hendrik, Lintje Kalangi, Linda Lambey, "Analisis Kendala-kendala yang Dihadapi Satuan Pengawas Internal dalam Membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado", *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9, No. 2018.

Maryam, Neneng Siti, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.

Respationo, H. M. Soerya, "Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi", *Masalah-masalah*

Hukum *E-Journal* Universitas Diponegoro, Jilid 42, No. 1, Januari 2013.

Rustiono, Deddy, "Zona Nyaman Baru Bernama Zona Integritas", Gagasan, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Situmorang, Victorio H., "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", Jurnal Balitbang HAM, Vol. 13, No. 1, Maret 2019.

C. Tugas Akhir

Alfaruqi, Muhammad Umar, 2013, *Analisis Fungsi Pengawasan dan Peran Inspektorat Jenderal Dalam Penerapan Good Public Governance (Studi Kasus: Kementerian Keuangan)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok.

Fathonah, Eneng, 2017, *Analisis Pelaksanaan Upaya Pengendalian Gratifikasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Nugroho, Arief, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Good Governance (Studi Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara)*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Putera, Cahya Purnama, 2019, *OPTIMALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN Kasus Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yunika, Winda, 2016, *Sistem Pengendalian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Terciptanya Good Governance and Clean Governance*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

D. Internet

Fitri Rachmawati, "Kasus Suap, Mantan Kepala Imigrasi Mataram Dituntut 7 Tahun Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/11/14573511/kasus-suap-mantan-kepala-imigrasi-mataram-dituntut-7-tahun-penjara?page=all>, diakses 3 Maret 2020.

Media Indonesia, "Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi 2020", <https://mediaindonesia.com/read/detail/278422-tantangan-dan-strategi-reformasi-birokrasi-2020>, diakses 4 November 2019.

Ombudsman Republik Indonesia, "Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi>, diakses 4 November 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

F. Dokumen Lain

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, Buku Profil Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Semester I Tahun Anggaran 2019, Jakarta.